

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan utama atas Aset Tetap di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Manokwari, dapat disimpulkan:

1. Pemerintah Daerah yang paling banyak jumlah temuan aset tetapnya tahun 2012 - 2014 adalah Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan temuan tertinggi ada pada aset tetap peralatan dan mesin.
2. Permasalahan utama aset tetap mesin pada Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kasus aset belum memiliki sertifikat atau bukti pendukung yang sah dan kasus pemanfaatan/pengelolaan aset tetap ini tanpa bukti pemanfaatan/pengelolaan
3. Pemerintah Daerah yang paling banyak nilai temuan aset tetapnya adalah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dengan nilai temuan terbesar adalah pada aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
4. Permasalahan utama aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kabupaten Manokwari adalah adanya aset yang belum dilakukan/selesai Inventarisasi & Penilaian (IP) dan terdapat perbedaan penyajian Nilai Aset Tetap di Neraca dengan pencatatan di Buku Inventarisasi Barang Milik Daerah, Laporan Inventarisasi, hasil penelusuran Inspektorat.

5. Permasalahan utama aset tetap di Pemerintah Daerah tahun 2012 – 2014 dalam bentuk jumlah temuan adalah permasalahan pencatatan dan penatausahaan aset tetap tidak sesuai peraturan yang berlaku dan permasalahan aset tetap belum memiliki sertifikat/bukti pendukung yang sah.
6. Permasalahan utama aset tetap di Pemerintah Daerah tahun 2012 – 2014 dalam bentuk nilai temuan di sebabkan oleh permasalahan belum dilakukan/selesainya Inventarisasi & Penilaian (IP) dan permasalahan pencatatan dan penatausahaan aset tetap tidak sesuai peraturan yang berlaku.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset tetapnya hendaknya segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI terhadap temuan aset tetap yang terjadi, agar tidak menjadi temuan berulang di tahun berikutnya.
2. Untuk penatausahaan aset tetap yang lebih optimal direkomendasikan agar melakukan upaya peningkatan kinerja pengurus barang dengan membuat kebijakan maupun peraturan yang mendukung program-program peningkatan etos kerja dan disiplin pengurus barang serta dibutuhkan koordinasi dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap.
3. Untuk permasalahan bukti pendukung yang sah diharapkan agar pemerintah daerah serius dalam merencanakan dan meningkatkan target

aset yang akan disertifikasi atau dilengkapi bukti pendukungnya. Selain itu untuk dokumen yang ada agar disimpan dengan baik dengan memperhatikan faktor keamanan dokumen agar tidak rusak atau hilang.

4. Untuk permasalahan belum dilakukan/selesainya Inventarisasi & Penilaian (IP), Pemerintah Daerah perlu melakukan inventarisasi aset tetap untuk melengkapi data aset tetap secara lebih rinci dan akurat.

5.3. Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini antara lain :

1. Terdapat keterangan jumlah temuan yang rinci di satu pemerintah daerah, sedangkan di pemerintah daerah yang lain tidak terinci, sehingga beberapa permasalahan jumlah temuannya di satu pemerintah daerah yaitu Kab. Kep. Selayar terlihat sangat besar karena tersedianya data yang lebih terinci.
2. Terdapat data aset tetap yang tidak tersedia datanya. Di satu temuan aset tetap hanya tersedia jumlah kasusnya, namun tidak tersedia nilai temuannya. Dan sebaliknya di lain temuan hanya tersedia nilai temuannya, namun tidak tersedia jumlah kasusnya.
3. Jenis temuan di masing-masing pemerintah daerah ada perbedaan cara penyampaian LHP oleh BPK di masing-masing daerah sehingga penulis menemukan sedikit kendala untuk mengklasifikasikannya, yaitu dibutuhkan waktu yang lebih banyak.

